

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok kegiatan, yaitu audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri. Tentunya dalam melakukan tugasnya tersebut, auditor BPKP harus melakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor.

Sebagai konsultan, auditor BPKP berperan pertama sebagai pemberi nasehat, dalam hal ini membantu pembuat kebijakan dengan menilai program atau kebijakan yang sedang berjalan, proses bisnis, serta berbagi informasi tentang praktek-praktek terbaik dalam rangka memberikan nilai tambah bagi organisasi. Kedua, memberikan pendidikan dan pelatihan baik diklat teknis maupun diklat penjenjangan. Sebagai katalis berperan sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) BPKP Perwakilan Sumatera Selatan diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali resiko-resiko pencapaian tujuan organisasi. *Quality assurance* bertujuan untuk menyakinkan bahwa program yang dijalankan telah menghasilkan produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Disamping itu, seorang auditor harus mampu menjadi pengawal setia bagi pencapaian tujuan organisasi dan terciptanya “*value*” bagi organisasi. Auditor harus mampu memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mendorong terwujudnya *good public governance*. Kondisi ini akan tercapai jika setiap auditor terbangun nilai-nilai kejujuran, kompetensi, independensi dan komitmen yang kuat kepada organisasi.

Budaya organisasi diyakini juga dapat mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi, karena budaya organisasi merupakan keyakinan dasar yang melandasi visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya organisasi yang didukung dengan independensi serta mempunyai komitmen (loyalitas) yang tinggi terhadap organisasinya maka kinerja auditor tersebut diharapkan menjadi lebih baik.

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan

bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Terkait dengan independensi, auditor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang merupakan auditor internal pemerintah memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik. Kadang intervensi politik bisa terjadi jika temuan terkait sampai dengan ranah politik

Disamping itu, peran auditor sangat besar dalam pemberantasan korupsi yang pada akhirnya membawa harapan dan resiko bagi auditor itu sendiri. Dengan kata lain profesi auditor seperti pedang bermata dua. Disatu sisi diharapkan terciptanya tata pemerintahan yang baik/*good public governance*. Disisi lain resiko yang harus dihadapi baik resiko yang berbahaya misal tekanan dari pihak auditi, ancaman dengan menggunakan parang, ancaman psikis maupun resiko yang “tidak berbahaya” misal pemberian uang dari auditi walau dengan alasan uang makan, uang transpot dll. Namun seharusnya resiko tersebut, baik yang berbahaya maupun yang “tidak berbahaya” tidak mempengaruhi independensi auditor dalam membuat keputusan.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor dilakukan sebelumnya oleh Wati *et al.* (2010) yang hasilnya menunjukkan bahwa hubungan independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pemahaman *good governance* baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah.

Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, antara lain: kemampuan (*ability*),

komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut. Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007).

Dari uraian diatas, terlihat bahwa lingkup kinerja auditor rawan terhadap penyimpangan dan mengandung resiko yang besar. Dengan lingkup kinerja yang luas dan resiko yang besar, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Budaya Organisasi, dan Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Independensi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan?
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan?
3. Apakah *Good Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan?
4. Apakah Independensi, Budaya Organisasi, dan *Good Governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya mengenai pengaruh independensi, budaya organisasi, dan *good governance* terhadap kinerja auditor pada BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah baik secara parsial maupun simultan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, terhadap kinerja auditor pemerintah baik secara parsial maupun simultan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah baik secara parsial maupun simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di samping memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang audit kinerja pemerintah khususnya Pengaruh Independensi, Budaya Organisasi, dan *Good Governance* terhadap kinerja auditor pemerintah.

2. Bagi Auditor

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada auditor baik auditor senior maupun auditor junior dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi (*auditing*) harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selalu menegakkan Kode Etik Akuntan sebagai Profesi Akuntan Publik.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan dan informasi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian yang lebih lanjut khususnya mengenai kinerja auditor pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Independensi Auditor, Budaya Organisasi, dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Auditor tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan ruang lingkup serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu pengumpulan data dan pemilihan sampel, serta penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.